JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal. 1065-1078, ISSN: 3089-0128 (Online)

Analisis Sentimen Publik terhadap Dugaan Korupsi Eks Jampidsus pada Kolom Komentar *YouTube* KOMPASTV

Raden Fachry Nurrakhman
Program Studi Ilmu Komunikasi K. Pangandaran, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
e-mail: raden4020@mail.unpad.ac.id

Article Info

Article history:

Received Juli 18, 2026
Revised Juli 30, 2026
Accepted Agustus 03, 2026

Keywords:

Sentiment Analysis, Social Media, Corruption, Public Trust, Digital Public Sphere

ABSTRACT

This research analyzes public sentiment in the YouTube comment section of KOMPASTV toward alleged corruption involving a former Deputy Attorney General for Special Crimes (Jampidsus). Using a mixed methods approach that integrates lexicon-based sentiment analysis with qualitative contextual analysis, 101 comments were categorized into positive, negative, and neutral sentiment. Results show negative sentiment dominated with 75 comments (74.3%), followed by neutral sentiment at 19 comments (18.8%), while positive sentiment accounted for only 7 comments (6.9%). WordCloud visualization reveals the dominance of the words hukum (law), mati (death), rakyat (people), and koruptor (corruptor). Contextual analysis found that negative comments frequently questioned the structural integrity of the prosecutorial institution, while positive comments largely represented support for the law enforcement process itself. This research provides an overview of public sentiment patterns toward alleged misconduct by law enforcement officials in social media comment spaces.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received Juli 18, 2026
Revised Juli 30, 2026
Accepted Agustus 03, 2026

Keywords:

Analisis Sentimen, Media Sosial, Korupsi, Kepercayaan Publik, Ruang Publik Digital

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis sentimen publik dalam kolom komentar YouTube KOMPASTV terhadap dugaan korupsi eks Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Menggunakan pendekatan mixed methods yang mengintegrasikan analisis sentimen berbasis leksikon dengan analisis kontekstual kualitatif, sebanyak 101 komentar dikategorikan menjadi sentimen positif, negatif, dan netral. Hasil menunjukkan sentimen negatif mendominasi dengan 75 komentar (74,3%), diikuti sentimen netral 19 komentar (18,8%), dan sentimen positif hanya 7 komentar (6,9%). Visualisasi WordCloud mengungkapkan dominasi kata hukum, mati, rakyat, dan koruptor. Analisis kontekstual menemukan bahwa komentar negatif banyak mempertanyakan integritas institusi kejaksaan secara struktural, sementara komentar positif lebih banyak merepresentasikan dukungan terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pola sentimen publik terhadap dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum di ruang komentar media sosial.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Raden Fachry Nurrakhman
Universitas Padjadjaran
raden4020@mail.unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan struktural yang telah lama membebani sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sejak era reformasi 1998, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda prioritas nasional, ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga penegak hukum yang secara khusus dibentuk untuk menangani perkara korupsi, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi hingga direktorat khusus tindak pidana korupsi di tubuh Kejaksaan dan Kepolisian. Ironisnya, alih-alih menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, sejumlah pejabat di institusi penegak hukum tersebut justru berulang kali terseret dalam pusaran dugaan korupsi yang sama. Fenomena ini menimbulkan persoalan yang jauh lebih kompleks dibandingkan kasus korupsi pada umumnya, sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar kerugian keuangan negara, melainkan juga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus atau yang lebih dikenal dengan sebutan eks Jampidsus menjadi salah satu contoh mutakhir dari fenomena tersebut. Sebagai pejabat yang secara struktural bertanggung jawab langsung atas penanganan perkara korupsi berskala besar di Indonesia, keterlibatan figur ini dalam dugaan tindak pidana korupsi menimbulkan ironi yang tajam dan memantik gelombang perhatian publik yang sangat besar, terutama di ruang digital. Pemberitaan mengenai kasus ini oleh media arus utama seperti KOMPASTV melalui kanal *YouTube* resminya pun disambut dengan ribuan interaksi warganet, mulai dari tontonan, komentar, hingga perdebatan yang mencerminkan beragam sikap dan emosi kolektif masyarakat terhadap institusi kejaksaan.

Fenomena keterlibatan pejabat penegak hukum dalam dugaan pelanggaran bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola berulang yang cukup konsisten memantik respons publik yang intens di ruang digital. Qathrunnada et al. (2025) meneliti bagaimana media daring seperti Detikcom, Kompas.com, dan Tempo.co memproduksi wacana resistensi ketika Ketua KPK periode 2019 sampai 2023 ditetapkan sebagai tersangka korupsi, sebuah peristiwa yang turut memicu konflik terbuka antara KPK dan Kepolisian serta menyita perhatian media secara luas selama berbulan-bulan. Pola serupa juga tampak pada kasus penembakan oleh pejabat tinggi Polri yang diteliti Santoso (2025), di mana insiden tersebut memicu krisis kepercayaan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menghasilkan respons masif warganet, tercatat hingga delapan belas ribu *twit* dalam rentang waktu pengumpulan data penelitian tersebut. Kajian bibliometrik Valentina & Permana (2025) turut mengkonfirmasi bahwa isu reputasi institusi penegak hukum di media sosial menjadi topik penelitian yang tren perhatiannya meningkat tajam dalam lima tahun terakhir, bergeser dari sekadar evaluasi protektif menuju manajemen komunikasi digital dan legitimasi publik. Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum, termasuk kasus dugaan korupsi eks Jampidsus yang menjadi fokus penelitian ini, konsisten memantik respons publik yang jauh lebih intens dibandingkan kasus korupsi pada institusi non-penegak hukum, sebab menyentuh persoalan kepercayaan yang jauh lebih mendasar.

Media sosial, khususnya *YouTube*, telah bertransformasi menjadi ruang publik digital sebagaimana dikonseptualisasikan Habermas (1989) dalam karya klasiknya tentang ruang publik borjuis, yaitu arena di mana warga negara dapat berdiskusi secara rasional mengenai isu bersama dan membentuk opini publik yang berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan politik. Konsep ruang publik ini terus mengalami pembaruan seiring perkembangan teknologi

digital. Habermas sendiri, dalam refleksinya yang lebih mutakhir, menegaskan bahwa digitalisasi telah membawa transformasi struktural lanjutan terhadap ruang publik, memperluas sekaligus memfragmentasi arena diskursus, serta mengubah setiap pengguna menjadi penulis potensial yang dapat memproduksi wacana tanpa lagi bergantung sepenuhnya pada *gatekeeper* media konvensional. Staab & Thiel (2022) melengkapi pandangan tersebut dengan berargumen bahwa media sosial perlu dipahami melalui kacamata ekonomi politik, karena logika komersial *platform* turut membentuk pola aktivasi politik penggunanya, bukan sekadar netral sebagai wadah deliberasi belaka. Sander (2025) menambahkan bahwa ruang publik kontemporer yang dibentuk media sosial lebih menyerupai apa yang disebutnya sebagai *popular public sphere*, sebuah ruang yang tetap terjerat logika konsumeris namun juga menyimpan potensi emansipatoris yang belum sepenuhnya terwujud.

Di antara berbagai *platform* media sosial, *YouTube* memiliki karakteristik yang khas sebagai ruang deliberasi publik. Kolom komentar *YouTube*, sebagaimana ditunjukkan Boukes (2025) dalam studinya terhadap 2.447 komentar *YouTube* di ranah politik, memiliki karakter deliberatif yang dapat dianalisis melalui empat standar normatif, yaitu interaktivitas, keragaman, rasionalitas, dan sipilitas wacana. Studi tersebut menemukan bahwa kualitas deliberasi di kolom komentar sangat bergantung pada jenis konten yang dikomentari, sehingga konteks video menjadi variabel penting yang turut membentuk corak wacana yang muncul. Ziegele et al. (2018) turut menegaskan bahwa dinamika diskusi berita daring, termasuk keterlibatan dan kesediaan berpartisipasi warganet, sangat dipengaruhi oleh bagaimana artikel berita dan komentar pembaca lain membentuk suasana diskusi secara keseluruhan. Karakteristik ini menjadikan kolom komentar video berita tentang isu korupsi aparat hukum sebagai objek kajian yang relevan untuk memahami sejauh mana ruang publik digital benar-benar berfungsi sebagai arena deliberasi rasional, ataukah justru bertransformasi menjadi arena luapan emosi kolektif ketika isu yang diangkat menyentuh kemarahan moral publik.

Isu yang diangkat dalam penelitian ini memiliki karakter yang berbeda secara mendasar dibandingkan isu-isu sosial-politik yang umum diteliti dalam kajian sentimen media sosial sebelumnya. Isu pendidikan, kebijakan publik, atau bahkan gerakan sosial mahasiswa pada umumnya cenderung menyentuh kepentingan luas masyarakat tanpa memicu polarisasi ideologis yang tajam, sehingga distribusi sentimen publik terhadapnya cenderung lebih beragam dan tidak sepenuhnya dominan ke satu arah. Sebaliknya, dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu retaknya kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi penjaga keadilan itu sendiri. Montes & Luna (2021) dalam kajian lintas negara berbasis data panel menemukan bahwa transparansi fiskal dan kualitas sistem hukum berkorelasi kuat dengan persepsi publik terhadap kontrol korupsi, sehingga ketika institusi hukum sendiri diduga terlibat korupsi, dampaknya terhadap persepsi publik cenderung jauh lebih tajam dibandingkan kasus korupsi yang melibatkan institusi non-penegak hukum. Ida et al. (2020) juga menegaskan bahwa partisipasi politik warganet muda Indonesia di media sosial berada pada level yang cukup tinggi dibandingkan negara tetangga, sehingga isu yang menyentuh kepercayaan terhadap institusi hukum berpotensi memicu respons yang masif dan menyebar dengan cepat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan antara pendekatan analisis sentimen berbasis *lexicon* dengan analisis kontekstual kualitatif yang secara khusus diarahkan pada isu dugaan korupsi aparat penegak hukum di ranah komentar *YouTube*, sebuah kombinasi konteks dan pendekatan yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sentimen media sosial Indonesia. Sebagian besar penelitian sentimen terkait korupsi di Indonesia berfokus pada *platform Twitter* dan pada institusi antikorupsi seperti KPK sebagai objek sentimen, bukan pada dugaan korupsi yang justru menimpa aparat penegak hukum itu sendiri. Darwis et al. (2020) misalnya meneliti sentimen publik terhadap kinerja KPK melalui data *Twitter* menggunakan algoritma *Support Vector Machine*, sementara Khatami & Kurnia (2022) mengkaji perdebatan

publik di *Twitter* terkait polemik pemecatan pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan, dengan data mencapai 7.789 *twit* dalam rentang waktu pengumpulan data mereka. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memosisikan institusi penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, sebagai objek dugaan pelanggaran itu sendiri, sekaligus menganalisis *platform YouTube* yang memiliki dinamika interaksi dan format komentar yang berbeda dibandingkan *Twitter*.

Kajian mengenai *framing* pemberitaan kasus korupsi pejabat negara juga telah banyak dilakukan sebelumnya, meskipun umumnya berfokus pada analisis teks berita, bukan pada respons dan sentimen publik di kolom komentar. Leliana et al. (2021) meneliti *framing* pemberitaan kasus korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBC Indonesia, menemukan bahwa media cenderung memberi ruang klarifikasi bagi pemerintah dan KPK dalam upaya penindakan. Tamrin et al. (2024) mengkaji *framing* media daring terhadap kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dengan model Entman dipadukan teori konstruksi sosial realitas Berger dan Luckmann. Bungsu & Muzakir (2023) menganalisis *framing* kasus korupsi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, sementara Ainani & Hamdie (2025) membandingkan *framing* media lokal dan nasional pada kasus operasi tangkap tangan KPK di Kalimantan Selatan, menemukan adanya perbedaan penekanan antara media lokal yang lebih menonjolkan dampak sosial-kultural daerah dengan media nasional yang lebih menekankan aspek hukum dan kelembagaan. Studi-studi tersebut umumnya menggunakan model *framing* Entman (1993) yang mencakup empat elemen, yaitu pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian, sebagaimana juga diterapkan Febriana et al. (2020) dengan kombinasi model Gamson dan Modigliani pada pemberitaan KPK. Ananda et al. (2019) turut menunjukkan bahwa media daring sekalipun dapat memilih untuk bersikap netral dalam *framing* kasus korupsi massal demi menjaga citra pihak tertentu. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut secara konsisten berhenti pada level analisis teks berita dan belum menjangkau bagaimana publik yang membaca dan menonton berita tersebut benar-benar merespons secara emosional dan sikap melalui kolom komentar, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis langsung suara warganet.

Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis sentimen berbasis *lexicon* yang dipadukan dengan analisis kontekstual kualitatif, sebuah pendekatan yang dipilih karena kelebihannya dalam interpretabilitas dan kemampuannya bekerja tanpa memerlukan data berlabel dalam jumlah besar. Koto & Rahmaningtyas (2017) melalui pengembangan *InSet Lexicon* menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *lexicon* cukup efektif digunakan untuk mengidentifikasi opini tertulis dalam bahasa Indonesia dan mengategorikannya ke dalam sentimen positif atau negatif. Pamungkas & Putri (2016) turut menegaskan efektivitas pendekatan berbasis *lexicon* untuk teks berbahasa Indonesia yang memiliki karakteristik informal dan kaya variasi ekspresi, meskipun mengakui adanya keterbatasan dalam menangkap makna idiomatik dan frasa multi-kata. Secara umum, Medhat et al. (2014) dalam survei komprehensif mereka mengklasifikasikan pendekatan analisis sentimen ke dalam tiga kategori besar, yaitu berbasis *lexicon*, berbasis pembelajaran mesin, dan berbasis pembelajaran mendalam, di mana pendekatan *lexicon* tetap relevan untuk penelitian dengan sumber daya terbatas namun menuntut interpretasi mendalam terhadap nuansa bahasa dan konteks sosial-budaya penuturnya.

Aspek lain yang menjadi perhatian khusus penelitian ini adalah karakter emosional dari respons publik terhadap dugaan korupsi aparat hukum, sebuah dimensi yang jarang disentuh dalam kajian sentimen konvensional yang cenderung berhenti pada angka distribusi semata. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa konten yang mengandung muatan moral dan emosional cenderung menyebar lebih cepat dan memicu respons yang jauh lebih intens di media sosial dibandingkan konten netral. Brady et al. (2017) menemukan bahwa emosi berperan penting dalam difusi konten bermuatan moral di jejaring sosial, di mana setiap penambahan kata

bermuatan moral-emosional dalam sebuah unggahan secara signifikan meningkatkan tingkat penyebarannya. Brady et al. (2020) mengembangkan model *MAD* yang menjelaskan bagaimana motivasi, atensi, dan desain *platform* saling berinteraksi dalam mendorong penyebaran konten moral secara daring. Sawaoka & Monin (2018) turut mengidentifikasi apa yang mereka sebut sebagai paradoks kemarahan viral, di mana ekspresi kemarahan kolektif di ruang digital ternyata tidak selalu berkorelasi dengan tindakan nyata untuk perubahan, melainkan lebih sering berhenti sebagai luapan emosi sesaat. Fenomena semacam ini berkaitan erat dengan apa yang disebut Trottier (2017, 2020) sebagai *digital vigilantism*, yaitu praktik warganet melakukan penghakiman kolektif secara daring terhadap pihak yang dianggap bersalah tanpa melalui proses hukum formal, sebuah gejala yang di Indonesia turut tercermin dalam fenomena tagar dan wacana *no viral no justice* sebagaimana dibahas Gussela et al. (2024) dari perspektif teori penegakan hukum. Sobieraj & Berry (2011) mengingatkan bahwa pergeseran dari inisilitas menuju kemarahan kolektif dalam wacana politik daring dapat mengubah karakter ruang publik dari arena deliberasi rasional menjadi arena luapan emosi yang justru mereduksi kualitas diskursus itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tiga hal utama. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis distribusi sentimen publik, baik positif, negatif, maupun netral, dalam komentar *YouTube* terhadap pemberitaan dugaan korupsi eks Jampidsus di kanal KOMPASTV. Kedua, mengeksplorasi kata kunci dominan dalam komentar tersebut untuk memahami wacana yang berkembang di kalangan warganet, termasuk perbedaan corak kata kunci antar kategori sentimen. Ketiga, menginterpretasikan implikasi dari distribusi sentimen tersebut terhadap kepercayaan publik pada institusi penegak hukum serta kualitas deliberasi di ruang publik digital, khususnya bila dibandingkan dengan pola sentimen pada isu-isu sosial-politik lain yang tidak menyentuh langsung integritas aparat hukum.

Signifikansi penelitian ini bersifat multidimensi. Bagi kajian ilmu komunikasi, penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman mengenai sejauh mana ruang publik digital, dalam hal ini kolom komentar *YouTube*, mampu memfasilitasi deliberasi rasional sebagaimana diidealkan Habermas, ataukah justru cenderung menjadi arena ekspresi kemarahan moral kolektif ketika isu yang diangkat menyentuh langsung retaknya kepercayaan terhadap institusi hukum. Bagi institusi penegak hukum, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi mengenai reputasi digital lembaga serta urgensi transparansi komunikasi publik dalam menghadapi krisis kepercayaan. Bagi media massa seperti KOMPASTV, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana konten yang mereka produksi turut membentuk ruang diskursus publik dan direspons secara emosional oleh audiensnya. Bagi pengembangan metodologi penelitian, kombinasi pendekatan *lexicon* dan analisis kontekstual yang diterapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis yang mengkaji sentimen publik terhadap isu-isu sensitif lain yang menyentuh kepercayaan terhadap institusi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* yang mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Dari perspektif kuantitatif, penelitian ini menerapkan analisis berbasis *lexicon* untuk mengkategorikan dan menghitung distribusi sentimen (positif, negatif, dan netral) pada 101 komentar *YouTube*, dan menggunakan visualisasi data seperti diagram distribusi sentimen dan *wordcloud* untuk mempresentasikan frekuensi kata-kata kunci secara numerik. Sementara dari perspektif kualitatif, penelitian ini melakukan analisis kontekstual yang mendalam terhadap komentar, menginterpretasikan makna tersirat, mempertimbangkan nuansa linguistik seperti sarkasme dan referensi implisit, serta melakukan reklasifikasi komentar netral berdasarkan evaluasi kontekstual.

Pendekatan gabungan ini dipilih karena kompleksitas bahasa dalam media sosial Indonesia yang tidak bisa sepenuhnya ditangkap melalui analisis kuantitatif semata. Analisis kuantitatif memberikan gambaran umum tentang distribusi sentimen dan pola-pola kata kunci, sementara analisis kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, makna tersirat, dan nuansa dalam komunikasi daring, terutama pada isu yang sarat muatan moral seperti dugaan korupsi aparat penegak hukum. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sentimen publik terhadap dugaan korupsi eks Jampidsus di *platform YouTube*.

Analisis sentimen yang digunakan adalah analisis berbasis *lexicon*, yang merupakan teknik dalam pemrosesan bahasa alami untuk mendeteksi sentimen dalam teks. Teknik ini bekerja dengan memanfaatkan daftar kata dan frasa (*lexicon* atau kamus) yang telah dikategorikan berdasarkan emosi atau polaritas sentimen, kemudian memberi label pada kata-kata tersebut sebagai positif, negatif, atau netral untuk mengidentifikasi sentimen keseluruhan dari sebuah teks. Pendekatan berbasis *lexicon* dipilih karena kelebihannya dalam hal interpretabilitas dan kemampuannya untuk bekerja tanpa memerlukan data berlabel dalam jumlah besar (Koto & Rahmaningtyas, 2017), yang sering kali sulit diperoleh untuk konteks analisis sentimen dalam bahasa Indonesia, sekaligus cukup adaptif terhadap karakteristik bahasa Indonesia yang informal di ruang digital (Pamungkas & Putri, 2016). Medhat et al. (2014) menegaskan bahwa di antara tiga pendekatan besar dalam analisis sentimen, yaitu berbasis *lexicon*, berbasis pembelajaran mesin, dan berbasis pembelajaran mendalam, pendekatan *lexicon* tetap relevan digunakan pada penelitian berskala kecil hingga menengah yang menuntut interpretasi mendalam terhadap konteks sosial-budaya penuturnya.

Pengumpulan data dilakukan dari komentar-komentar pengguna pada video *YouTube* KOMPASTV yang membahas tentang dugaan korupsi eks Jampidsus. Data dikumpulkan menggunakan *YouTube Data API v3*, dengan total 101 komentar yang dianalisis. Setiap data komentar mencakup informasi nama akun pengguna, isi komentar, waktu penulisan komentar, dan jumlah *likes* yang diterima. Kriteria inklusi untuk pengambilan data meliputi komentar berbahasa Indonesia pada video KOMPASTV terkait dugaan korupsi eks Jampidsus, komentar yang merupakan tanggapan langsung terhadap video (bukan balasan terhadap komentar lain), dan komentar yang mengandung setidaknya satu kalimat lengkap.

Penggunaan 101 komentar sebagai sampel penelitian didasarkan pada pendekatan total sampling, yaitu seluruh komentar tingkat pertama pada video yang memenuhi kriteria inklusi tersebut diambil secara keseluruhan, bukan melalui teknik penarikan sampel acak dari populasi yang lebih besar. Pendekatan ini dipilih karena jumlah komentar yang memenuhi kriteria pada video tersebut tergolong terbatas dan masih dapat dianalisis secara menyeluruh, sehingga seluruh komentar yang relevan dapat diikutsertakan tanpa risiko bias seleksi yang biasanya muncul pada teknik sampling acak. Dengan demikian, data yang dianalisis merepresentasikan keseluruhan wacana publik yang muncul pada kolom komentar video tersebut pada rentang waktu pengumpulan data dilakukan, bukan sekadar potongan sampel dari populasi komentar yang lebih besar.

Tahapan proses analisis data terdiri dari enam langkah utama. Pertama, pra-pemrosesan data yang meliputi normalisasi teks dengan mengubah ke huruf kecil, menghilangkan karakter khusus dan tanda baca, penghapusan *stopwords*, serta tokenisasi untuk memecah teks menjadi kata-kata individual. Kedua, pengelompokan kata kunci menjadi tiga kategori: positif (seperti "hasil", "harus", "bukti"), negatif (seperti "hukum", "mati", "koruptor"), dan netral (seperti "uang", "jaksa", "pendidikan"). Ketiga, analisis kontekstual untuk mengidentifikasi kata-kata yang secara literal tampak netral atau ambigu namun dalam konteks pemberitaan korupsi dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi kemarahan atau tuntutan keadilan, serta menganalisis keterkaitan komentar dengan konteks dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Keempat, klasifikasi sentimen dengan menghitung skor sentimen berdasarkan jumlah

kata kunci positif dikurangi jumlah kata kunci negatif, kemudian mengklasifikasikan ke dalam kategori positif (skor > 0), negatif (skor < 0), atau netral (skor = 0). Kelima, reklasifikasi komentar netral melalui analisis mendalam untuk mengidentifikasi pola sentimen implisit yang tidak tertangkap kata kunci leksikal semata, mengingat komentar berbahasa Indonesia di media sosial sering menggunakan ungkapan tidak langsung dan sarkasme. Keenam, visualisasi data dengan membuat diagram distribusi sentimen dan *wordcloud* untuk mengidentifikasi kata-kata dominan dalam setiap kategori sentimen.

Pendekatan metodologis ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap sentimen komentar *YouTube* dengan mempertimbangkan tidak hanya frekuensi kata-kata kunci, tetapi juga konteks dan nuansa bahasa yang digunakan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi publik terhadap dugaan korupsi eks Jampidsus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis sentimen terhadap 101 komentar pada video *YouTube* KOMPASTV mengenai dugaan korupsi eks Jampidsus menunjukkan distribusi sebagai berikut. Sentimen Negatif: 75 komentar (74,3%), Sentimen Netral: 19 komentar (18,8%), dan Sentimen Positif: 7 komentar (6,9%).

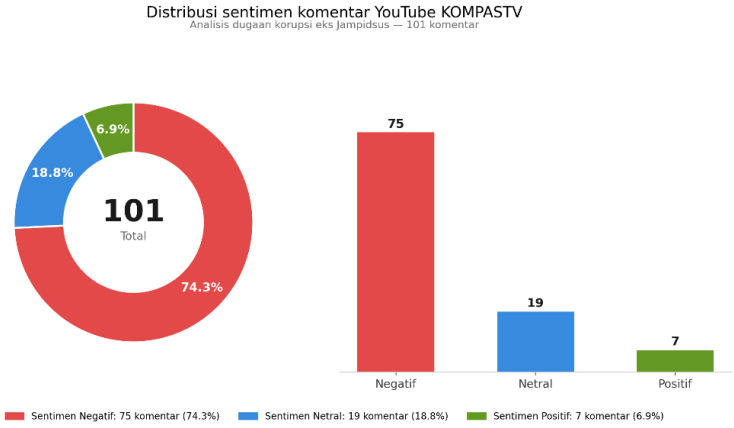

Gambar 1. Distribusi Sentimen Komentar *YouTube*

Sumber: Olahan Penulis (2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar komentar (74,3%) memberikan sentimen negatif terhadap dugaan korupsi yang melibatkan eks Jampidsus. Persentase ini sangat signifikan dan mengindikasikan adanya kemarahan publik yang masif terhadap kasus ini. Sentimen netral mencakup 18,8% dari keseluruhan komentar, sementara sentimen positif hanya 6,9%, proporsi yang sangat kecil dan menunjukkan bahwa hampir tidak ada dukungan publik terhadap figur yang diduga terlibat korupsi tersebut.

Pola distribusi sentimen ini berbeda secara fundamental dibandingkan pola sentimen publik terhadap isu-isu sosial-politik lain yang tidak menyentuh langsung integritas aparat penegak hukum. Pada isu-isu seperti aksi mahasiswa menolak kebijakan publik, sentimen publik cenderung dominan positif karena isu tersebut dipandang sebagai perjuangan kolektif untuk kepentingan luas, sementara sentimen negatif biasanya berada pada kisaran minoritas kecil. Pola pada penelitian ini justru terbalik, sentimen negatif mendominasi hampir tiga perempat dari keseluruhan komentar. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui perspektif Montes & Luna (2021), yang menemukan bahwa persepsi publik terhadap kontrol korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem hukum, sehingga ketika institusi hukum sendiri diduga terlibat korupsi, dampaknya terhadap persepsi publik jauh lebih tajam dibandingkan kasus korupsi pada institusi non-penegak hukum. Kasus ini menyentuh apa yang dapat disebut sebagai

pengkhianatan kepercayaan berlapis, sebab publik tidak hanya kehilangan kepercayaan terhadap satu pejabat, melainkan mempertanyakan integritas institusi kejaksaan secara keseluruhan.

Dominasi sentimen negatif ini juga sejalan dengan temuan kajian bibliometrik Valentina & Permana (2025) yang mengkonfirmasi bahwa isu reputasi institusi penegak hukum di media sosial menjadi topik yang tren perhatiannya meningkat tajam, seiring semakin banyaknya kasus pelanggaran yang melibatkan aparat hukum itu sendiri. Pola serupa juga tampak dalam temuan Santoso (2025) mengenai krisis kepercayaan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia pascakasus penembakan oleh pejabat tinggi Polri, yang turut menghasilkan respons digital yang masif dan didominasi sentimen negatif. Kedua temuan tersebut, bersama dengan hasil penelitian ini, menunjukkan pola yang konsisten bahwa dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum secara sistematis memicu gelombang kemarahan publik yang jauh lebih intens dibandingkan isu sosial-politik pada umumnya.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai wacana yang berkembang dalam komentar-komentar tersebut diperoleh melalui analisis *wordcloud* yang mengidentifikasi kata-kata paling sering muncul.



Gambar 2. *WordCloud* Keseluruhan Komentar
Sumber: Olahan Penulis (2026)

Berdasarkan analisis *wordcloud*, kata-kata yang paling dominan dalam keseluruhan komentar adalah hukum dan mati, diikuti rakyat, indonesia, uang, koropsi/korupsi, pejabat, maling, dan koruptor. Dominasi kata hukum dan mati secara khusus menarik untuk dicermati, sebab kombinasi kedua kata ini dalam konteks pemberitaan korupsi kerap merujuk pada tuntutan hukuman mati bagi koruptor, sebuah tuntutan yang secara konsisten muncul di ruang publik digital Indonesia setiap kali kasus korupsi besar mencuat. Fenomena tuntutan hukuman ekstrem semacam ini berkaitan erat dengan apa yang disebut Gussela et al. (2024) sebagai fenomena *no viral no justice*, yaitu keyakinan warganet bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila suatu kasus mendapatkan sorotan publik yang cukup besar. Kata rakyat yang juga muncul dengan frekuensi tinggi mengindikasikan adanya *framing* bahwa uang yang diduga dikorupsi bukan sekadar kerugian administratif negara, melainkan hak rakyat yang dirampas secara langsung, pola *framing* yang serupa dengan temuan Ananda et al. (2019) mengenai bagaimana wacana korupsi di media daring kerap dikaitkan dengan kepentingan rakyat secara luas.

Kemunculan kata maling dan koruptor secara berdampingan dengan pejabat menunjukkan adanya delegitimasi bahasa yang tajam terhadap figur yang diduga terlibat kasus ini. Penggunaan istilah maling alih-alih istilah hukum yang lebih netral seperti tersangka atau terduga mencerminkan apa yang oleh Trottier (2017, 2020) disebut sebagai *digital vigilantism*, yaitu praktik warganet melakukan penghakiman kolektif secara daring terhadap pihak yang

dianggap bersalah, bahkan sebelum proses hukum formal berjalan tuntas. Pola bahasa merendahkan semacam ini konsisten dengan temuan Sobieraj & Berry (2011) bahwa wacana politik daring kerap bergeser dari kritik substantif menuju ekspresi kemarahan kolektif yang menyerang karakter pihak yang menjadi objek kritik. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan kata kunci antara komentar positif, negatif, dan netral.

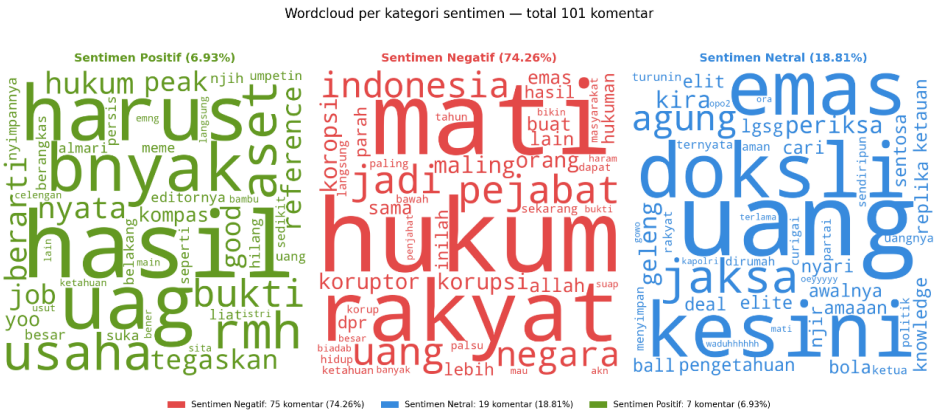

Gambar 3. *WordCloud* Berdasarkan Kategori Sentimen
Sumber: Olahan Penulis (2026)

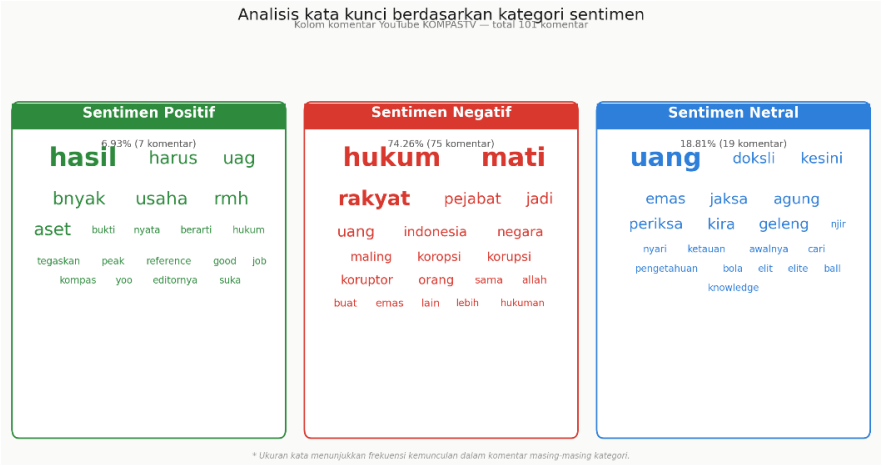

Gambar 4. Analisis Kata Kunci Berdasarkan Kategori Sentimen
Sumber: Olahan Data Peneliti (2026)

Pada komentar dengan sentimen positif, yang hanya berjumlah 7 komentar atau 6,9% dari keseluruhan sampel, kata-kata yang dominan meliputi hasil, harus, uang, aset, dan bukti. Proporsi yang sangat kecil ini sudah dengan sendirinya menunjukkan bahwa hampir tidak ada ruang bagi opini yang membela atau memaklumi dugaan pelanggaran ini. Analisis kontekstual terhadap komentar positif mengungkapkan bahwa sentimen positif dalam kategori ini sebagian besar bukan merupakan dukungan terhadap figur yang diduga korupsi, melainkan dukungan terhadap proses hukum itu sendiri. Kata harus dan hasil kerap muncul dalam konstruksi kalimat yang menuntut proses hukum berjalan tuntas dan aset yang diduga hasil korupsi disita sepenuhnya, bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap terduga pelaku. Pola ini berbeda dari temuan pada isu-isu sosial-politik lain, misalnya gerakan mahasiswa, di mana sentimen positif biasanya merepresentasikan dukungan eksplisit terhadap aktor utama yang menjadi subjek berita. Pada kasus ini, sentimen positif justru merepresentasikan dukungan terhadap penegakan hukum yang tegas, bukan dukungan terhadap pihak yang diberitakan.

Pada komentar dengan sentimen negatif, yang mendominasi 74,3% dari keseluruhan sampel, kata-kata yang dominan meliputi hukum, mati, rakyat, pejabat, jadi, uang, indonesia, dan negara. Analisis kontekstual terhadap komentar negatif mengungkapkan beberapa tema utama yang menjadi dasar kemarahan publik. Pertama, Tuntutan Hukuman Berat, di mana banyak komentar negatif secara eksplisit menuntut hukuman maksimal, termasuk hukuman mati, bagi pihak yang diduga terlibat korupsi, tercermin dari tingginya frekuensi kemunculan kata hukum dan mati secara berdampingan. Kedua, Delegitimasi Institusional, di mana komentar negatif tidak hanya menyerang individu yang diduga terlibat, melainkan turut mempertanyakan integritas institusi kejaksaan secara keseluruhan, tercermin dari kemunculan kata pejabat dan negara dalam konteks kritik struktural, bukan sekadar kritik personal. Ketiga, *Framing* Kerugian Rakyat, di mana komentar negatif secara konsisten mengaitkan dugaan korupsi ini dengan kerugian langsung yang dialami rakyat, tercermin dari tingginya frekuensi kata rakyat dan uang yang muncul berdampingan. Keempat, Bahasa Delegitimasi dan Sarkasme, di mana sejumlah komentar menggunakan istilah merendahkan seperti maling dan koruptor untuk menggambarkan figur yang diduga terlibat, alih-alih istilah hukum yang lebih netral.

Pola argumentasi dalam komentar negatif ini sejalan dengan konsep *moral contagion* yang dikemukakan Brady et al. (2017) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Brady et al. (2020) melalui model *MAD*, yang menjelaskan bagaimana konten bermuatan moral dan emosional cenderung menyebar lebih cepat dan memicu respons kolektif yang jauh lebih intens dibandingkan konten netral. Kemarahan kolektif yang tampak dalam komentar negatif ini juga berkaitan dengan apa yang disebut Sawaoka & Monin (2018) sebagai paradoks kemarahan viral, di mana ekspresi kemarahan yang masif di ruang digital tidak serta-merta berkorelasi dengan tuntutan perubahan struktural yang konkret, melainkan lebih banyak berhenti sebagai luapan emosi kolektif berupa tuntutan hukuman personal terhadap figur yang bersangkutan.

Pada komentar dengan sentimen netral, yang mencakup 18,8% dari keseluruhan sampel, kata-kata yang dominan meliputi uang, doksli, kesini, emas, dan jaksa. Berbeda dengan pola pada penelitian pembanding di mana komentar netral cenderung bersifat informatif dan analitis mengenai kebijakan publik, komentar netral pada kasus ini lebih banyak berisi diskusi seputar bukti dan legalitas kasus, tercermin dari kemunculan kata doksli yang kemungkinan merujuk pada dokumen atau bukti kepemilikan aset yang menjadi bahan perdebatan warganet, serta kata jaksa yang mengindikasikan diskusi seputar proses hukum yang sedang berjalan. Kemunculan kata emas dalam kategori netral turut mengindikasikan adanya diskusi spesifik mengenai aset berupa logam mulia yang menjadi bagian dari materi pemberitaan kasus ini. Analisis kontekstual terhadap komentar netral mengungkapkan bahwa kategori ini didominasi oleh dua karakteristik utama, yaitu Orientasi Faktual, di mana komentar netral berfokus pada penyampaian informasi atau spekulasi mengenai detail bukti dan proses hukum tanpa disertai penilaian emosional eksplisit, dan Ekspresi Keheranan, di mana sejumlah komentar netral, tercermin dari kata kesini yang lazim digunakan dalam ungkapan informal seperti kok bisa sampai begini, mengekspresikan keheranan atau kebingungan terhadap skala dugaan korupsi tanpa disertai tuntutan hukuman eksplisit sebagaimana pada kategori negatif.

Implikasi Temuan

Distribusi sentimen dengan dominasi sentimen negatif yang sangat tinggi (74,3%) mengindikasikan adanya krisis kepercayaan publik yang serius terhadap institusi penegak hukum, khususnya kejaksaan, pascadugaan korupsi eks Jampidsus. Temuan ini memiliki beberapa implikasi teoretis dan praktis yang penting.

Pertama, Krisis Legitimasi Institusional. Berbeda dengan temuan pada isu-isu sosial-politik lain yang tidak menyentuh langsung integritas aparat hukum, dominasi sentimen negatif pada kasus ini mengindikasikan retaknya kepercayaan publik terhadap institusi yang

seharusnya menjadi penjaga keadilan itu sendiri. Hal ini menegaskan argumen Montes dan Luna (2021) bahwa kualitas sistem hukum berkorelasi kuat dengan persepsi publik terhadap kontrol korupsi, dan ketika institusi hukum sendiri diduga terlibat korupsi, dampaknya terhadap legitimasi institusional jauh lebih tajam dibandingkan kasus korupsi pada institusi lain.

Kedua, Ruang Publik sebagai Arena Kemarahan Moral, bukan Deliberasi Rasional. Merujuk pada teori ruang publik Habermas (1989), kolom komentar *YouTube* idealnya berfungsi sebagai arena warga negara berdiskusi secara rasional mengenai isu bersama. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketika isu yang diangkat menyentuh kemarahan moral kolektif seperti dugaan korupsi aparat hukum, kolom komentar cenderung bertransformasi menjadi arena ekspresi emosi kolektif ketimbang ruang deliberasi rasional sebagaimana diidealkan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Staab & Thiel (2022) bahwa media sosial perlu dipahami melalui kacamata ekonomi politik, di mana logika *platform* turut memfasilitasi dan bahkan memperkuat sirkulasi konten bermuatan emosional tinggi. Boukes (2025) turut menegaskan bahwa kualitas deliberasi di kolom komentar *YouTube* sangat bergantung pada jenis konten yang dikomentari, dan isu bermuatan moral tinggi seperti korupsi aparat hukum cenderung menghasilkan wacana yang kurang rasional-deliberatif dibandingkan isu kebijakan publik biasa.

Ketiga, Fenomena *Digital Vigilantism* dan Tuntutan Hukuman Ekstrem. Tingginya frekuensi kata hukum dan mati yang muncul berdampingan, serta penggunaan istilah delegitimasi seperti maling dan koruptor, mengindikasikan adanya kecenderungan warganet melakukan penghakiman kolektif secara daring, sebagaimana dikonseptualisasikan Trottier (2017, 2020). Fenomena ini berkaitan erat dengan wacana *no viral no justice* yang dibahas Gussela et al. (2024), di mana warganet meyakini bahwa tekanan publik yang masif merupakan prasyarat bagi tegaknya keadilan, sebuah keyakinan yang mencerminkan skeptisisme mendalam terhadap independensi proses hukum formal.

Keempat, Polarisasi Asimetris yang Ekstrem. Distribusi sentimen yang sangat timpang (74,3% negatif, 18,8% netral, 6,9% positif) menunjukkan pola polarisasi yang jauh lebih ekstrem dibandingkan isu-isu sosial-politik yang tidak kontroversial seperti isu pendidikan, yang lazimnya menghasilkan distribusi sentimen yang lebih berimbang. Pola ini menegaskan argumen Sobieraj & Berry (2011) bahwa isu yang menyentuh pelanggaran kepercayaan mendasar cenderung menghasilkan konsensus emosional negatif yang jauh lebih homogen dibandingkan isu kebijakan publik pada umumnya, yang biasanya memunculkan keragaman sudut pandang yang lebih luas.

Kelima, Implikasi bagi Institusi Penegak Hukum dan Media. Tingginya dominasi sentimen negatif ini mengindikasikan urgensi bagi institusi kejaksaan untuk memperkuat transparansi komunikasi publik dalam menghadapi krisis kepercayaan semacam ini. Bagi media seperti KOMPASTV, temuan ini menegaskan peran *watchdog* media dalam memfasilitasi pengawasan publik terhadap institusi penegak hukum, sekaligus menunjukkan bahwa konten pemberitaan korupsi aparat hukum memiliki daya tarik emosional yang tinggi bagi audiens digital, sebagaimana juga ditemukan dalam kajian *framing* korupsi pejabat negara oleh Ainani & Hamdie (2025), Bungsu & Muzakir (2023), Leliana et al. (2021), serta Tamrin et al. (2024) yang secara konsisten menunjukkan bahwa pemberitaan korupsi pejabat negara menjadi salah satu jenis konten yang paling banyak memantik respons publik di berbagai *platform* media.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis sentimen komentar YouTube pada video KOMPASTV mengenai dugaan korupsi eks Jampidsus. Berdasarkan analisis terhadap 101 komentar, ditemukan bahwa 74,3% komentar mengekspresikan sentimen negatif, 18,8% bersifat netral, dan hanya 6,9% mengekspresikan sentimen positif.

Analisis kata kunci mengungkapkan bahwa kata-kata seperti hukum, mati, rakyat, uang, dan koruptor mendominasi wacana dalam komentar-komentar tersebut. Komentar negatif, yang mendominasi hampir tiga perempat sampel, cenderung menuntut hukuman berat dan mendelegitimasi institusi kejaksaan secara struktural. Komentar netral berfokus pada diskusi seputar bukti dan proses hukum yang berjalan, sementara komentar positif, yang jumlahnya sangat minoritas, umumnya merepresentasikan dukungan terhadap proses penegakan hukum, bukan pembelaan terhadap figur yang diduga terlibat.

Temuan ini menegaskan bahwa dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum memicu pola sentimen publik yang jauh lebih negatif dan terpolarisasi dibandingkan isu sosial-politik lain yang tidak menyentuh langsung integritas aparat hukum.

Keterbatasan penelitian ini meliputi fokus yang terbatas pada satu platform media sosial, yaitu YouTube, dan satu outlet media, yaitu KOMPASTV, serta pendekatan analisis sentimen berbasis leksikon yang mungkin belum sepenuhnya menangkap nuansa bahasa informal dan sarkasme. Sampel yang terbatas pada 101 komentar juga mungkin tidak merepresentasikan keseluruhan opini publik mengenai isu ini secara nasional.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi perbandingan sentimen antarplatform media sosial, membandingkan pola sentimen terhadap korupsi aparat penegak hukum dengan institusi non-penegak hukum, atau menggunakan metode analisis sentimen berbasis pembelajaran mesin untuk hasil yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Ainani, M., & Hamdie, N. T. A. (2025). Analisis Komparatif Framing Media Lokal dan Nasional pada Kasus OTT KPK di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, *7*(2), 321–337. https://doi.org/10.24076/pikma.v7i2.2002

Ananda, M. F. S., Nugraha, A. R., & Sumartias, S. (2019). Analisis framing pemberitaan korupsi massal di media online detik.com. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, *3*(2), 253. https://doi.org/10.25139/jsk.v3i2.1464

Boukes, M. (2025). Deliberation in online political talk: exploring interactivity, diversity, rationality, and incivility in the public spheres surrounding news vs. satire. *Journal of Communication*, *75*(2), 125–136. https://doi.org/10.1093/joc/jqae038

Brady, W. J., Crockett, M. J., & Van Bavel, J. J. (2020). The MAD Model of Moral Contagion: The Role of Motivation, Attention, and Design in the Spread of Moralized Content Online. *Perspectives on Psychological Science*, *15*(4), 978–1010. https://doi.org/10.1177/1745691620917336

Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *114*(28), 7313–7318. https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114

Bungsu, A. P., & Muzakir, F. (2023). Analisis Framing Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G Plate. *Journal of Da'wah*, *2*(1), 132–149. https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2813

Darwis, D., Pratiwi, E. S., & Pasaribu, A. F. O. (2020). PENERAPAN ALGORITMA SVM UNTUK ANALISIS SENTIMEN PADA DATA TWITTER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA. *Edutic - Scientific Journal of Informatics Education*, *7*(1). https://doi.org/10.21107/edutic.v7i1.8779

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, *43*(4), 51–58. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Febriana, R. P., Sukarelawati, S., & Fitriah, M. (2020). FRAMING DEVICE IN GAMSON AND MODIGLIANI MODEL ABOUT THE NEWS OF KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *JURNAL KOMUNIKATIO*, *6*(2). https://doi.org/10.30997/jk.v6i2.2753

Gussela, M. D., Kurniawati, M., N, J. S., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2024). Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(2), 792–800. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326

Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.

Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020). An empirical analysis of social media usage, political learning and participation among youth: a comparative study of Indonesia and Pakistan. *Quality & Quantity*, *54*(4), 1285–1297. https://doi.org/10.1007/s11135-020-00985-9

Khatami, M. I., & Kurnia, N. (2022). E-Demokrasi pada Perdebatan Publik di Twitter: Analisis Konten Polemik Pemecatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Riset Komunikasi*, *5*(1), 51–69. https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i1.449

Koto, F., & Rahmaningtyas, G. Y. (2017). Inset lexicon: Evaluation of a word list for Indonesian sentiment analysis in microblogs. *2017 International Conference on Asian Language Processing (IALP)*, 391–394. https://doi.org/10.1109/IALP.2017.8300625

Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis Framing Model Robert Entman tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, *21*(1), 60–67. https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042

Medhat, W., Hassan, A., & Korashy, H. (2014). Sentiment analysis algorithms and applications: A survey. *Ain Shams Engineering Journal*, *5*(4), 1093–1113. https://doi.org/10.1016/j.asej.2014.04.011

Montes, G. C., & Luna, P. H. (2021). Fiscal transparency, legal system and perception of the control on corruption: empirical evidence from panel data. *Empirical Economics*, *60*(4), 2005–2037. https://doi.org/10.1007/s00181-020-01849-9

Pamungkas, E. W., & Putri, D. G. P. (2016). An experimental study of lexicon-based sentiment analysis on Bahasa Indonesia. *2016 6th International Annual Engineering Seminar (InAES)*, 28–31. https://doi.org/10.1109/INAES.2016.7821901

Qathrunnada, Z., Nugroho, C., Yusanto, F., Wulandari, A., & Wulan, R. R. (2025). Ideology, resistance, and sociopolitical dynamics in Indonesia: media narratives and resistance discourses on the chairman of the corruption eradication commission's corruption case. *Frontiers in Communication*, *10*. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1552110

Sander, A. (2025). Social Media, Democracy, and the Popular Public Sphere. *Constellations*, *32*(2), 330–342. https://doi.org/10.1111/1467-8675.12773

Santoso, P. (2025). Social network analysis of murder cases in Indonesian police institutions: Digital public opinion mapping. *Jurnal ASPIKOM*, *10*(2), 203. https://doi.org/10.24329/aspikom.v10i2.1653

Sawaoka, T., & Monin, B. (2018). The Paradox of Viral Outrage. *Psychological Science*, *29*(10), 1665–1678. https://doi.org/10.1177/0956797618780658

Sobieraj, S., & Berry, J. M. (2011). From Incivility to Outrage: Political Discourse in Blogs, Talk Radio, and Cable News. *Political Communication*, *28*(1), 19–41. https://doi.org/10.1080/10584609.2010.542360

Staab, P., & Thiel, T. (2022). Social Media and the Digital Structural Transformation of the Public Sphere. *Theory, Culture & Society*, *39*(4), 129–143. https://doi.org/10.1177/02632764221103527

Tamrin, S., Meutia, F. S., & Riduan, I. M. (2024). Framing Analysis of Syahrul Yasin Limpo Corruption Case in Online Media. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, *9*(4), 538–555. https://doi.org/10.26618/jed.v9i4.16282

Trottier, D. (2017). Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility. *Philosophy & Technology*, *30*(1), 55–72. https://doi.org/10.1007/s13347-016-0216-4

Trottier, D. (2020). Denunciation and doxing: towards a conceptual model of digital vigilantism. *Global Crime*, *21*(3–4), 196–212. https://doi.org/10.1080/17440572.2019.1591952

Valentina, I. R., & Permana, I. (2025). Bibliometric analysis: The reputation of Indonesian law enforcement officials on social media. *Priviet Social Sciences Journal*, *5*(10), 318–325. https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.894

Ziegele, M., Weber, M., Quiring, O., & Breiner, T. (2018). The dynamics of online news discussions: effects of news articles and reader comments on users' involvement, willingness to participate, and the civility of their contributions. *Information, Communication & Society*, *21*(10), 1419–1435. https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1324505